



Journal of Government Science Studies
Available online at <https://ojs3.unpatti.ac.id/>
Vol. 2 No. 2, Oktober 2023, pages: 110-123
e-ISSN: 2827-847X, p-ISSN: 2827-8461
<https://doi.org/10.53730>



Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Logistik Pasca Bencana Pada Kantor BPPD Kabupaten Halmahera Selatan

Bakri La Suhu ^a, Abdulhalil Hi. Ibrahim ^b, Abdilah Jafar ^c, Marno Wance ^d

Email Corespondensi: bakrilasuhu@yahoo.com

Manuscript submitted: 30-04-2023, Manuscript revised: 01-05-2023, Accepted for publication: 10-10-2023

Keyword:

Employee
Performance 1;
Public Service 2;
Disaster Logistics 3.

Abstract: This study uses a qualitative research type by focusing on the study of the performance of South Halmahera Regency BPBD employees in post-disaster logistics services. Qualitative research emphasizes inductive analysis, not deductive analysis. The data sources used are primary data and secondary data, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. Based on the results of the study, it was shown that the performance of BPBD employees in South Halmahera Regency, seen from the productivity aspect of post-disaster logistics services, had not been maximally implemented. The aspect of the quality of logistics services has also not been maximally implemented, because the timeliness of logistics services is sometimes not timely when distributing them to the villages, while the attitude of BPBD staff is very good. The aspect of employee responsiveness has been very good in post-disaster logistics services, employees are very responsive to various logistical issues and are not selective in providing logistics services.

Kata Kunci:

Kinerja Pegawai 1;
Pelayanan Publik 2;
Logistik Bencana 3.

Abstrak: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan memfokuskan kajian pada kinerja pegawai BPBD Kabupaten Halmahera Selatan dalam pelayanan logistik pasca bencana. Penelitian kualitatif menekankan pada analisis induktif, bukan analisis deduktif. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai BPBD Kabupaten Halmahera Selatan dilihat dari aspek produktivitas pelayanan logistik pasca bencana belum maksimal dilaksanakan, ini disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, dan kompetensi SDM pegawai sudah sangat mendukung. Aspek kualitas pelayanan logistik juga belum maksimal dilaksanakan, karena ketepatan waktu pelayanan logistik yang kadangkala tidak tepat waktu saat pelaksanaan distribusi ke desa-desa, sedangkan sikap pegawai BPBD sudah sangat baik. Aspek responsivitas pegawai sudah sangat baik dalam pelayanan logistik pasca bencana, pegawai sangat tanggap terhadap berbagai persoalan logistik dan tidak pilih kasih dalam memberikan pelayanan logistik.

^{a b c} Universitas Muhammadiyah
Maluku Utara, Indonesia

^d Universitas Pattimura, Indonesia

1 Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tergolong cukup tinggi dan hampir setiap tahun di Indonesia terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, hingga pada gempa bumi. Data BNPB mencatat 1.205 bencana alam terjadi dari 1 Januari 2021 hingga 30 April 2021, sementara BMKG mencatat pada periode 1 Januari 2021 hingga 30 April 2021 terjadi 501 banjir, 339 angin puting beliung, 233 tanah longsor, 97 kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 18 kali gempa bumi, 16 kali gelombang pasang dan abrasi, dan satu bencana kekeringan. Rentang periode tersebut, bencana alam mengakibatkan korban meninggal 479 jiwa, hilang 60, luka-luka 12.900 dan menderita serta mengungsi hingga 5 juta jiwa. Bencana alam yang mengakibatkan korban meninggal tertinggi yaitu banjir 267 jiwa, gempa bumi 117, tanah longsor 86, angin puting beliung 7, dan karhutla serta gelombang pasang masing-masing 1. Sedangkan kerusakan fisik, BNPB mencatat bencana menyebabkan kerusakan sektor perumahan dengan kategori rusak berat 14.936 unit, rusak sedang 23.347 dan rusak ringan 83.629. Selain kerusakan rumah, bencana alam juga menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum seperti tempat ibadah 1.363 unit, Pendidikan 1.350, perkantoran 494, kesehatan 347 dan jembatan 295 (Sumber Data: www.kompas.com).

Permasalahan yang terjadi pada saat bencana sangat kompleks, mulai saat sebelum terjadi bencana maupun sesudah terjadi bencana, mulai dari bagaimana penanganan logistik, penanganan korban, penanganan dampak sesudah terjadi bencana dan lain-lain. Pada saat bencana alam terjadi ketidak pastian jumlah permintaan, ketidak normalan situasi. Dalam situasi bencana, keadaan sosial dapat bertambah parah apabila terjadi kelambatan penanganan korban bencana dan pengiriman bantuan. Pelayanan logistik bencana menjadi sangat penting dalam situasi ini. Kelemahan utama logistik kemanusiaan adalah kurangnya koordinasi dan prosedur penanganan yang kurang baik. Hellingrath, (2011) menyatakan bahwa tantangan utama dalam logistik kemanusiaan adalah infrastruktur, politik dan pemerintah. Menurut Gustavsson (2003), bahwa bencana alam tidak hanya merusak bangunan secara fisik, namun juga akan mempengaruhi mental dan keadaan sosial dari masyarakat yang terkena bencana. Kekurangan makanan, obat-obatan, penyebaran penyakit pasca bencana, dan kebutuhan untuk tempat berlindung sebagai pengganti rumah yang tidak bisa ditempati menyebabkan keadaan sosial di masyarakat menjadi berbeda dengan keadaan sebelum bencana. Keadaan sosial yang terpengaruh oleh bencana ini bisa diperparah dengan lambatnya penanganan korban bencana dan pengiriman bantuan. Menurut Paryanto, dkk (2022), kebijakan pelayanan wawasan kebangsaan (Paryanto, Wance, Hadi, Suhu, 2022), adanya fungsi pengawasan (Suhu, Ibrahim, Kaunar, 2022), harus adanya idealisme pelayanan publik (Herizal, Mukhrijal, Wance, 2020), pelayanan berbasis teknologi informasi (Ekram, Tuanaya, Wance, 2022), perlu adanya pengawasan dan monitoring secara terus menerus (Selanno, Wance, 2022), pelayanan berbasis kearifan lokal (Wance, Rifdan, Takdir, Ferdian, 2023).

Tujuan pelayanan logistik adalah menyampaikan barang jadi dan material dalam jumlah yang tepat pada waktu yang dibutuhkan, dalam keadaan yang dapat dipakai, ke lokasi di mana barang dan material tersebut dibutuhkan dan dengan total biaya yang paling rendah. Menurut Bowersox (2002), untuk mencapai tujuan logistik maka ada beberapa komponen yang saling terintegrasi yang perlu diperhatikan, yaitu jaringan fasilitas, transportasi, persediaan, komunikasi dan penyimpanan barang. Logistik pada sektor kemanusiaan yang dikenal dengan istilah *humanitarian logistics* merupakan penerapan dari konsep logistik yang khusus mengatur pengadaan, penyimpanan dan pengiriman bantuan selama fase tanggap darurat untuk orang-orang yang terkena bencana. Jenis dan kuantitas sumber daya, bagaimana cara pengadaan dan penyimpanan persediaan, bagaimana penanganan alat-alat pelacakan dan sarana transportasi ke daerah bencana, bagaimana koordinasi antar personil merupakan beberapa isu penting yang berhubungan langsung dengan logistik kemanusiaan. Menurut

Thomas dan Kopczak (2005:15) masalah utama yang sering dihadapi dalam sistem logistik bencana bukanlah jumlah pasokannya, namun pendistribusian yang lambat dan tidak tepat. Seringkali dalam pendistribusian bantuan tidak merata sehingga terjadi kesenjangan logistik antar korban bencana. Pendistribusian yang lambat bisa disebabkan karena informasi yang lambat, penerimaan dan perencanaan yang tidak tepat dan proses pendistribusian yang lambat.

Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan merupakan daerah yang rawan akan berbagai macam bencana. Berdasarkan data historis Bencana BPBD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2019, terjadi berbagai jenis bencana di Kabupaten Halmahera Selatan; seperti gempa bumi yang terjadi sebanyak 61 kali, bencana gelombang pasang terjadi 2 kali, kebakaran (ruko dan rumah) 4 kali, bencana banjir dan tanah longsor terjadi 1 kali, dan abrasi pantai 2 kali. Kondisi daerah Kabupaten Halmahera Selatan memiliki geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadi berbagai macam bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa sebanyak 80 orang (1 meninggal), kerusakan berat fasilitas pemerintah sebanyak 39 unit, kerusakan berat fasilitas umum sebanyak 80 unit, kerusakan rumah penduduk sebanyak 2.913 unit (rusak ringan 755 unit, rusak sedang 953 unit dan rusak berat sebanyak 1.205 unit) serta dampak psikologis bagi masyarakat yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Dalam kondisi darurat bencana baik itu bencana tanah longsor, banjir dan gempa bumi, tentunya masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, organisasi masyarakat ataupun swasta. Bantuan yang dibutuhkan sebagian besar masyarakat adalah bantuan logistik, bantuan tersebut mencakup kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti sembako, mie instant, makanan siap saji, selimut, matras dan lainnya. Bantuan Logistik dibutuhkan untuk penanggulangan bencana khususnya pada saat pasca terjadi bencana. Dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan, dan tepat sasaran, berdasarkan skala prioritas dan standar pelayanan, sedangkan dalam pasal 1 Perka BNPB No.13/2008 Tentang Pedoman Manajemen Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana dijelaskan agar pengelolaan logistik dan peralatan dilaksanakan dengan cepat, tepat, terpadu dan akuntabel.

Dengan melihat kondisi Indonesia yang seringkali mengalami berbagai bencana, maka pemerintah membentuk satu lembaga/badan yang dikhususkan untuk menangani masalah bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten/Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005. Pada tingkat kabupaten, BPBD Halmahera Selatan sesungguhnya memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri. Tugas pokok dari BPBD yakni membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Penanggulangan Bencana Daerah, sedangkan fungsi BPBD yakni :

- 1) Perumusan kebijakan daerah dibidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- 2) Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- 4) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi

Melalui tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka dari itu dibutuhkan kinerja pegawai yang baik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan agar segala bencana alam yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan dapat ditanggulangi dengan baik dan cepat, dan yang terlebih penting lagi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang

terkena bencana. Kinerja merupakan salah satu elemen penting untuk menentukan keberhasilan suatu organisasi. Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar kerja yang dapat diartikan sebagai hasil kerja. Setiap anggota organisasi, karyawan ataupun pegawai memiliki tugasnya masing-masing dalam organisasi serta wajib untuk menjalankannya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, maka tugas-tugas tersebut harus dirancang dengan benar dan juga dapat dijabarkan secara jelas. Berdasarkan amatan awal penulis selama berada di Kantor BPBD Kabupaten Halmahera Selatan masih terdapat berbagai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelayanan logistik pasca bencana gempa yang berkekuatan hingga 7,2 magnitudo pada tanggal 14 Juli tahun 2019 yang terjadi di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Persoalan-persoalan tersebut antara lain yakni ;

pertama, sulitnya koordinasi antara pendonor yang memberikan bantuan dan pemerintah yang menyalurkan bantuan, sebagian pemberi bantuan, baik lembaga swadaya masyarakat atau perusahaan, langsung memberikan bantuannya ke lokasi bencana, tanpa berkoordinasi dengan pemerintah. Pemerintah adalah pihak berwenang yang memiliki data mengenai daerah yang sudah dan belum tersentuh logistik. *Kedua*, pasca gempa tahun 2019, terjadi penumpukan logistik di satu titik, sementara di titik pengungsian lainnya justru kekurangan. "Misal mereka kenal dengan Bupati dan Camat, dan kades mereka langsung ke sana, padahal di desa itu tidak perlu para pendonor tidak bergerak sendiri para pemberi bantuan berkoordinasi dengan pemerintah agar penyaluran bantuan dapat lebih merata". Jadi prinsipnya, semua harus ada koordinasinya. *Ketiga*, sulitnya pegawai BPBD Halmahera Selatan untuk mencapai lokasi yang terisolasi. Sejumlah tempat sulit dijangkau oleh kendaraan bermotor sehingga datangnya bantuan menjadi terlambat. Sulit menjangkau daerah yang terisolir. *Keempat*, ketidaktahuan antara pemerintah dan korban bencana alam yang terkena dampak bencana. Pemerintah kurang mendapat informasi mengenai daerah terdampak gempa yang belum tersentuh bantuan. *Kelima*, ketika bencana terjadi data Kartu Keluarga/jiwa dari Kecamatan dan Desa terlambat masuk ke BPBD sehingga menghambat pendistribusian logistik ke lokasi bencana, dan *keenam* yakni pada saat distribusi logistik bencana, pegawai BPBD mengalami kendala yang di hadapi adalah kondisi cuaca di laut dan darat. Dari latar belakang yang penulis telah disajikan tersebut di atas, maka fokus dari penelitian ini tentang "Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Logistik Pasca Bencana (Studi Pada Kantor BPBD Kabupaten Halmahera Selatan)"

2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan memfokuskan kajian pada kinerja pegawai BPBD Kabupaten Halmahera Selatan dalam pelayanan logistik pasca bencana. Penelitian kualitatif menekankan pada analisis induktif, bukan analisis deduktif. Data yang dikumpulkan bukan dimaksudkan untuk mendukung atau menolak hipotesis yang telah disusun sebelum penelitian dimulai, tetapi abstraksi disusun sebagai kekhususan yang telah terkumpul dan dikelompokkan bersama lewat proses pengumpulan data yang telah dilaksanakan secara teliti (Sutopo, 2006). Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan gambar. Selain itu, semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut (Moleong, 2009).

Sumber Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebagian besar berupa data kualitatif. Maka sumber data yang digunakan yakni sebagai berikut :

Informan atau narasumber, yang terdiri dari beberapa informan seperti :

1. Bapak M. Ichwan Isk. Alam, SE selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Halmahera Selatan
 2. Bapak Abdullah, ST selaku Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 3. Bapak Sukari Sudjana, SE selaku Kepala Seksi Logistik
 4. Masyarakat yang terkena bencana gempa 2 orang terdiri :
 - a. Bapak Sefnat Ido (Desa Kuwo)
 - b. Bapak Saul Kode (Desa Kuwo)
 - c. Bapak Hamidi Syawal (Desa Tawa)
 - d. Bapak Budiyo (Desa Pasupalele)
- a. Arsip-arsip dan atau dokumen resmi sebagai bahan untuk data pendukung yang dapat memperjelas data utama.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data yang sebaik-baiknya, sehingga dengan begitu data yang diperoleh dapat diklasifikasikan dan diolah serta dianalisis sesuai dengan kerangka metode penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

(a) observasi (*observation*)

Observasi yakni pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti dengan cara terlangsung pada objek penelitian. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti. Ada dua indera yang sangat vital di dalam melakukan pengamatan yaitu mata dan telinga. (Husaini Usman, 2004:54)

(b) wawancara (*interview*)

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancara disebut *interviewee*. (Husaini Usman, 2004:58)

(c) dokumentasi (*dokumentation*)

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder. (Husaini Usman, 2004).

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat kualitatif, meliputi catatan wawancara, catatan observasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, data resmi yang berupa dokumen atau arsip, memorandum dalam proses pengumpulan data dan juga semua pandangan yang diperoleh dari manapun serta dicatat. Dalam proses analisis kualitatif, menurut Miles & Huberman (dalam Sutopo, 2006) terdapat tiga komponen utama yang harus benar-benar dipahami, yaitu:

Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dari semua jenis informasi yang tertulis lengkap dalam catatan lapangan. Proses ini berlangsung terus sepanjang proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga narasi sajian data dan simpulan-simpulan dari unit-unit permasalahan yang telah dikaji dalam penelitian dapat dilakukan.

Sajian Data

Sajian data merupakan narasi mengenai berbagai hal yang terjadi atau ditemukan di lapangan,

sehingga memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan atas pemahamannya tersebut. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari suatu penelitian kualitatif. Peneliti berusaha untuk memberikan makna yang penuh dari data yang terkumpul. Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Proses analisis dalam penelitian kualitatif, secara khusus kegiatannya pada dasarnya dilakukan secara induktif, interaktif dari setiap unit datanya, bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data, dan dengan proses siklus. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (*Interactive Model Of Analysis*). Peneliti bergerak di antara empat “sumbu” kumparan selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik di antara kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan.

3 Hasil dan Diskusi

Kinerja Pegawai BPBD Kabupaten Halmahera Selatan dalam Pelayanan Logistik Pasca Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk meminimalisir (mencegah dan menangani) dampak dari terjadinya bencana yang berada di sekitar masyarakat. Tentunya tugas yang dimiliki BPBD harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Salah satu untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD yakni kinerja dari pegawai BPBD dalam memberikan pelayanan logistik pasca bencana tahun 2019 di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Sebagai upaya dalam menjalankan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat, maka diperlukan untuk mengukur kinerja pegawai BPBD Kabupaten Halmahera Selatan dalam memberikan pelayanan logistik pasca bencana, penulis bersandarkan pada indikator kinerja yang dikemukakan Agus Dwiyanto dkk (2006:50-51), untuk mencapai hasil maksimal dari kinerja, ada beberapa indikator yang mempengaruhi kinerja lembaga yakni sebagai berikut; (1) Produktivitas, (2) Kualitas Layanan Publik, (3) Responsivitas, dan (4) Akuntabilitas.

Produktivitas Pegawai dalam Pelayanan Logistik Pasca Bencana

Hasil penelitian ini menunjukkan produktivitas mempunyai dua dimensi, yaitu pertama, efektivitas yang mengarah pada pencapaian untuk kerja yang maksimal yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Kedua, efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Produktivitas kerja adalah perbandingan antara hasil yang dicapai (*output*) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (*input*) (Sedarmayanti, 2001). Untuk dapat mengetahui tingkat produktivitas kinerja pegawai BPBD Kabupaten Halmahera Selatan, maka dapat diukur dengan beberapa aspek antara lain; a). kompetensi sumber daya manusia, dan b). sarana dan prasarana.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Setiap pemberian pelayanan publik khususnya dalam pelayanan logistik pasca bencana oleh BPBD Kabupaten Halmahera Selatan sangat dituntut dalam proses penyelenggaraannya efektif dan efisien. Maka dari itu, pegawai BPBD diharapkan memiliki kemampuan dalam pengetahuan, keahlian, kemandirian, penguasaan, kedisiplinan dan profesionalisme sehingga aktivitas kerja yang dikerjakan pegawai dapat menghasilkan (*ouput*) bentuk pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat, sehingga tanpa ada keluhan dan kesan masyarakat yang berlebihan atas pelayanan yang diterima. Tuntutan akan adanya kemampuan pegawai BPBD Kabupaten Halmahera Selatan dalam memberikan pelayanan

yang tepat, cepat, mudah dan lancar menjadi syarat penilaian bagi yang dilayani dalam memperlihatkan aktualisasi kerja pegawai dalam memahami lingkup dan uraian kerja yang menjadi perhatian fokus dari setiap pegawai dalam memberikan pelayanan logistik pasca bencana. Tuntutan kemampuan pegawai Kabupaten Halmahera Selatan sesungguhnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mengenai kompetensi petugas pemberi pelayanan disebutkan bahwa “Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan”. Dengan pegawai yang memiliki kemampuan, sudah tentunya kerja-kerja dalam pelayanan logistik pasca bencana dapat terlaksana dengan baik. Berikut hasil wawancara dengan Bapak M. Ichwan Isk Alam, SE selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Halmahera Selatan saat ditanya mengenai kompetensi sumber daya manusia (SDM) pegawai mengatakan:

“Dalam pelayanan logistik bencana, BPBD Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai sumber daya manusia diantaranya sarjana, diploma dan SMA, yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Jumlah pegawai yang ada di BPBD itu ada 51 orang, yang rinciannya antara lain :

- a. Pendidikan Strata Dua (S2) : 2 Orang
- b. Pendidikan Strata Satu (S1) : 27 Orang
- c. Diploma III (D3) : 1 Orang
- d. Pendidikan SMU/SMK : 21 Orang

51 orang tersebut, yang paling banyak berpendidikan Strata Satu (S1) berjumlah 27 orang”
(wawancara tanggal 13 September 2021 di Kantor BPBD Kabupaten Halmahera Selatan)

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa sumber daya manusia (SDM) pegawai pada Kantor BPBD Kabupaten Halmahera Selatan sudah memadai, karena sebagian besar pegawainya memiliki tingkat kompetensi pendidikan yang berbeda-beda mulai dari kompetensi pendidikan Diploma III, Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2). Melalui kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki BPBD, dapat membantu kelancaran proses pelayanan logistik pasca bencana. Berikut juga wawancara dengan Bapak Sukari Sudjana, SE selaku Kepala Seksi (Kasi) Logistik mengatakan bahwa :

“jumlah pegawai di Kantor BPBD Kabupaten Halmahera Selatan sudah memadai, yakni berjumlah 51 orang. Jumlah tersebut sudah punya kompetensi masing-masing, sehingga pada saat proses pelayanan logistik pasca bencana, semua pegawai memiliki tanggung jawab untuk bekerja dalam upaya melayani masyarakat dalam pelayanan logistik di lokasi bencana”
(wawancara tanggal 13 September 2021 di Kantor BPBD Kabupaten Halmahera Selatan)

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa kompetensi pegawai BPBD Kabupaten Halmahera Selatan dari aspek pendidikan sudah memadai dan proses pelayanan logistik pasca bencana seluruh pegawai diberikan tanggung jawab masing-masing untuk bekerja melayani kepentingan masyarakat di lokasi yang terkena bencana. Jadi prinsipnya bahwa, kompetensi pegawai sangat penting dalam pelayanan publik sehingga kerja-kerja yang ditugaskan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

Sarana dan Prasarana

Bentuk pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintah terhadap masyarakat sangat bermacam-macam. Salah satu bentuk pelayanan adalah pelayanan logistik pasca bencana. Tentunya, salah satu faktor yang dapat menentukan lancarnya suatu pelayanan yang di berikan oleh instansi pelaksana di pemerintahan yaitu ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai dan layak untuk dipakai dalam proses kelancaran pelayanan.

Setiap proses kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dalam instansi pelayanan publik baik pemerintah maupun swasta tidak akan terlepas dari sarana prasarana yang mendukung, karena sarana dan prasarana merupakan faktor utama dalam menyukkseskan kegiatan baik itu kegiatan pembangunan, pemberdayaan maupun dalam kegiatan pelayanan publik terhadap masyarakat. Begitu juga sebaliknya tanpa adanya sarana dan prasarana

yang kurang mendukung maka sudah barang tentu proses kegiatan akan mengalami hambatan dan tantangan. Olehnya itu perlu penambahan dan peningkatan kuantitas sarana dan prasarana dimaksud sehingga setiap kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik sesuai dengan target yang direncanakan sebelumnya.

Untuk dapat memperlancar daya kinerja pegawai pemerintah khususnya pada instansi BPBD Kabupaten Halmahera Selatan, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang baik dalam arti cukup dalam jumlah dan efisien, serta praktis dalam penggunaannya demi untuk menunjang pelaksanaan pelayanan. Di mana sarana dan prasarana ini diharapkan dapat mendukung mekanisme dari proses kerja pegawai yang ada di Kantor BPBD Kabupaten Halmahera Selatan dalam memberikan pelayanan logistik pasca bencana. Selain itu juga, sarana dan prasarana merupakan instrumen perantara dan pembantu bagi pegawai dalam melaksanakan berbagai tugas pekerjaannya.

Dengan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan memadai, maka secara otomatis dapat mendorong kinerja para pegawai untuk meningkatkan pelayanan logistik pasca bencana. Kaitannya dengan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor BPBD Kabupaten Halmahera Selatan, berikut wawancara dengan Bapak M. Ichwan Isk Alam, SE selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Halmahera Selatan mengatakan:

“sarana dan prasarana BPBD sampai dengan saat ini masih perlu untuk dilengkapi, dimana rentang kendali Halmahera Selatan yang terdiri dari pulau-pulau, contoh sarana yang perlu dilengkapi yakni transportasi laut. Jadi, untuk sarana dan prasarana yang telah dimiliki selama ini masih kurang/minim dan perlu penambahan lagi supaya dapat mendorong kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan logistik bencana di wilayah Halmahera Selatan” (*wawancara tanggal 13 September 2021 di Kantor BPBD Kabupaten Halmahera Selatan*)

Ungkapan yang sama pula disampaikan Bapak Abdullah, ST selaku Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan mengatakan bahwa :

“untuk sarana dan prasarana itu masih minim/kurang, dan terus berupaya untuk meningkatkannya sehingga dapat menunjang kerja-kerja pegawai dalam pelayanan logistik pasca bencana, paling utama itu sarana transportasi laut berupa kapal/speed boat, maklum wilayah Halmahera Selatan banyak pulau” (*wawancara tanggal 13 September 2021 di Kantor BPBD Kabupaten Halmahera Selatan*)

Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa sarana prasarana memiliki manfaat yang penting dalam menunjang pelaksanaan pelayanan. Maka dari itu, penambahan dan peningkatan sarana dan prasarana sangat diharapkan demi terselenggarakannya pelayanan logistik yang baik dan mencerminkan pelayanan yang merakyat dengan memenuhi semua sarana prasarana perkantoran. Peralatan kantor dan fasilitas kebutuhan pelayanan publik yang tepat guna didalam suatu instansi, terlebih instansi penyelenggaraan pelayanan publik sangat membantu jalannya suatu proses kegiatan pelayanan masyarakat. Sarana prasarana yang terdapat di Kantor BPBD Kabupaten Halmahera Selatan yang menunjang dalam kinerja pegawai dalam pelayanan logistik pasca bencana yakni sebagai berikut :

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Pelayanan Logistik Pasca Bencana Di Kantor BPBD Kabupaten Halmahera Selatan

No	Sarana & Prasarana Yang Pendukung BPBD	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
Sarana & Prasarana Darat				
1	Trail Kawasaki KLX orange	4 unit	3 unit	1 unit
2	Honda Beat	4 unit	3 unit	1 unit

3	Honda Vario	2 unit		2 unit
4	Honda Tiger	1 unit	1 unit	
5	Yamaha Mio	5 unit	4 unit	1 unit
6	Yamaha Bison	3 unit	3 unit	
7	Ford ranger doble gardan orange	1 unit	1 unit	
8	Isuzu Ambulance orange	1 unit		1 unit
9	Phanter Pick up orange	2 unit	2 unit	
10	Phanter cabin	1 unit	1 unit	
11	Mitsubhisi truk tanki air	1 unit	1 unit	
Sarana & Prasarana Laut				
1	Perahu Karet	3 unit	2 unit	1 unit
2	Speed Polyetilen	1 unit		1 unit
3	Perahu evakuasi	2 unit	2 unit	
4	Perahu Katamaran	2 unit	2 unit	
5	Speed Boat	1 unit		1 unit
Jumlah		34 unit	25 unit	9 unit

Sumber : Data Sekunder BPBD Kab. Halmahera Selatan, 2021

Dari hasil wawancara dan data pada tabel 4.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa sarana prasarana pendukung bagi pelayanan logistik pasca bencana di Kantor BPBD Kabupaten Halmahera Selatan dinilai belum memadai. Hal ini dikarenakan, sarana prasarana yang dimiliki masih minim dan sangat terbatas, namun sarana dan prasarana yang dimiliki perlu untuk dilengkapi dan ditingkatkan lagi jika dibandingkan dengan kondisi geografis Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pelayanan pada masyarakat, keberadaan sarana dan prasarana memegang peran yang penting. Sarana disini berkaitan dengan fasilitas-fasilitas penunjang dalam pelayanan logistik pasca bencana. Fasilitas-fasilitas penunjang yang dimaksud disini meliputi peralatan kantor yang digunakan dalam proses pelayanan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang terkait dengan kebutuhan logistik. Sarana pelayanan dapat berbentuk berbagai fasilitas, peralatan kantor yang digunakan dalam proses memproduksi, menyediakan, atau memberikan pelayanan logistik bencana terhadap masyarakat. Sedangkan prasarana dapat berupa berbagai fasilitas pendukung dan melengkapi berfungsinya sarana penyelenggaraan pelayanan secara baik dan optimal, yang digunakan langsung atau menunjang dalam proses penyelenggaraan pelayanan.

Kualitas Pelayanan Logistik Pasca Bencana

Ketepatan Waktu Pelayanan

Pelayanan yang baik harusnya didukung oleh sistem pelayanan yang baik pula, dengan sistem pelayanan yang memadai, terarah dan terukur akan menjadikan proses pelayanan menjadi sistematis dan membuahkan hasil yang baik dan dapat memuaskan masyarakat. Sistem pelayanan dimaksudkan adalah mengendalikan proses pelaksanaan pelayanan secara keseluruhan meliputi sumber daya manusia ataupun sarana dan prasarana sehingga ketepatan waktu pelayanan dapat terlaksana dengan baik. Waktu bagian dari sesuatu hal yang penting dalam sistem pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Jangka waktu proses penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan yang diberikan pegawai pada instansi pemerintahan. Maka dari itu, dalam memberikan pelayanan logistik pasca bencana, setiap masyarakat yang terkena bencana, berharap ada kepastian waktu pelayanan dalam mendistribusikan logistik bencana ke wilayah yang terkena bencana.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak M. Ichwan Isk Alam, SE selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Halmahera Selatan mengatakan bahwa :

“kualitas pelayanan dalam pelayanan logistik pasca bencana sudah sangat baik, dimana dapat dilihat dari mulai penanganan saat bencana sampai ke pemulihan pasca bencana sudah terlaksana. Kinerja pegawai pada saat distribusi logistik juga sudah tepat, karena pegawai BPBD dalam bekerja senantiasa berpedoman pada S.O.P.

.....sedangkan kalau untuk waktu pelayanan logistik pasca bencana belum maksimal, hal ini disebabkan keterbatasan sarana prasarana dan rentang kendali (jarak) antara Ibu Kota Kabupaten dengan lokasi bencana kadang sulit dijangkau” (*wawancara tanggal 13 September 2021 di Kantor BPBD Kabupaten Halmahera Selatan*)

Pernyataan Sekretaris BPBD Kabupaten Halmahera Selatan tersebut, dibenarkan oleh Bapak Sefnat Ido selaku masyarakat Desa Kuwo mengatakan :

“kalau waktu pelayanan logistik pasca bencana itu kadang-kadang juga terlambat dan tidak tepat waktu yang ditetapkan, tergantung bahan logistik yang didistribusikan ke masyarakat di juga jarak yang tempuh oleh pegawai BPBD menuju lokasi bencana agak jauh dan medannya susah dijangkau” (*wawancara tanggal 14 September 2021*)

Ungkapan yang sama pula disampaikan Bapak Hamidi Syawal selaku masyarakat Desa Tawa mengatakan :

“penyaluran logistik bencana di Desa Tawa memang belum sepenuhnya tepat waktu, kalau saya pikir masih ada kendala masalah jarak yang ditempuh dari Kota Labuha ke Desa Tawa ini agak sulit dijangkau pasca bencana. Kendala jarak ini wajar sudah, sehingga pelayanan logistik bencana yang dilakukan pegawai/staf dari BPBD belum tepat waktu” (*wawancara tanggal 11 November 2021*)

Dari wawancara tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa kinerja pegawai dalam pelayanan logistik pasca bencana sudah sesuai dengan S.O.P yang ditetapkan, namun dari sisi ketepatan waktu pelayanan logistik masih belum maksimal dilaksanakan oleh pegawai BPBD, ini dikarenakan rentan kendali antara Ibu Kota Kabupaten dengan lokasi/tempat desa yang terkena bencana sulit dijangkau sehingga pelayanan logistik kadangkala tidak tepat waktu saat pelaksanaan distribusi ke desa-desa. Dengan demikian, sesungguhnya ketepatan waktu pelayanan logistik pasca bencana masih bermasalah, sehingga mempengaruhi kinerja pegawai dalam pelayanan logistik pasca bencana ke desa yang terkena bencana.

Sikap Pegawai

Sebagai upaya mewujudkan rasa puas kepada seluruh masyarakat, maka pegawai sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pelayanan publik di BPBD Halmahera Selatan harus dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Bentuk wujud nyata dari pegawai dalam memberikan pelayanan yang maksimal dengan menunjukkan rasa sikap ramah dan sopan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan dari instansi pemerintah. Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan senantiasa menerapkan 3S (senyum, salam, dan sapa). Melalui sikap ramah dan sopan yang ditunjukkan oleh pegawai BPBD Kabupaten Halmahera Selatan, maka masyarakatpun akan merasa senang dan nyaman dalam mendapatkan atau menerima pelayanan logistik pasca bencana dari pegawai BPBD. Tentu sikap pegawai yang ramah dan sopan ini perlu tertanam dalam jiwa pegawai, sehingga setiap pelayanan logistik pasca bencana tidak terkesan yang kurang baik dari sikap pegawai. Untuk mengetahui sikap pegawai BPBD Kabupaten Halmahera Selatan dalam memberikan pelayanan logistik pasca bencana kepada masyarakat, berikut hasil wawancara dengan Bapak Sukari Sudjana, SE selaku Kepala Seksi Logistik mengatakan bahwa :

“sikap pegawai selalu sopan-sopan dan sikap ramah dalam bekerja untuk melayani logistik pasca bencana. Sikap ini selalu ditunjukkan pegawai pada saat pelayanan logistik di masyarakat yang terkena bencana” (*wawancara tanggal 13 September 2021 di Kantor BPBD Kabupaten Halmahera Selatan*)

Apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi tersebut, dibenarkan Bapak Saul Kode selaku masyarakat Desa Kuwo mengatakan :

“sikap pegawai BPBD sangat bagus dalam memberikan pelayanan logistik pasca bencana di Desa Kuwo. Pegawainya bertutur kata juga bagus dan senang di dengar, sikapnya juga sopan santun saat melakukan pelayanan logistik” (*wawancara tanggal 14 September 2021*)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa sikap pegawai BPBD Kabupaten Halmahera Selatan sudah sangat baik/ bagus dalam memberikan pelayanan logistik pasca bencana di desa/ lokasi yang terkena bencana. Sikap sopan santun dan sikap ramah terhadap masyarakat senantiasa dimiliki oleh setiap pegawai selaku penyelenggara pelayanan publik. Pegawai BPBD seringkali diberikan arahan, bimbingan dan bahkan petunjuk dari pimpinan untuk tetap bersikap yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang telah mendapat musibah bencana.

Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Responsivitas pelayanan publik sangat diperlukan, karna sebagai bukti kemampuan organisasi publik untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan seluruh rakyat disuatu Negara. Dalam hal ini responsivitas merupakan cara yang efisiensi dalam mengatur urusan baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah atau local dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karenanya baik pemerintah pusat maupun daerah dikatakan responsive terhadap kebutuhan masyarakat apabila kebutuhan masyarakat tadi diidentifikasi oleh para pembuat kebijakan dengan pengetahuan yang dimiliki, secara tepat dan dapat menjawab apa yang menjadi kepentingan publik (Widodo, 2007). Responsivitas pelayanan merupakan pertanggung jawaban dari sisi yang menerima pelayanan atau masyarakat. Seberapa jauh masyarakat melihat penyelenggara pelayanan bersikap tanggap terhadap permasalahan, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Pemberi layanan publik harus benar-benar memiliki rasa tanggap dan bertindak cepat serta tepat dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam pelayanan publik terhadap masyarakat.

Kebutuhan masyarakat pasca bencana sangat bervariasi, mulai dari kekurangan sembilan bahan pokok (Sembako), tempat tinggal, air bersih, pakaian dan sebagainya. Tentunya harapan masyarakat yang terkena bencana, semua kebutuhan tersebut segera dipenuhi demi untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat sehari-hari. Permasalahan masyarakat tersebut, sesungguhnya telah direspon dengan baik oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan, bentuk responsivitasnya dengan menugaskan pegawai untuk memberikan pelayanan logistik pasca bencana ke lokasi yang terdampak bencana. Berikut wawancara dengan Bapak M. Ichwan Isk Alam, SE selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Halmahera Selatan mengatakan bahwa :

“bencana ini tidak ada yang tahu, jika terjadi bencana, maka kami selaku instansi yang memiliki tugas khusus penanganan bencana tentu memiliki responsivitas terhadap kondisi bencana yang terjadi di desa-desa.

.....Responsivitas pegawai BPBD dalam pelayanan logistik pasca bencana sudah sangat baik, dimana ketika sampai dilokasi bencana tidak pernah memandangi siapa dia, semua masyarakat harus mendapatkan logistik yang disediakan, karena bencana adalah tanggung jawab bersama dalam kemanusiaan” (*wawancara tanggal 13 September 2021 di Kantor BPBD Kabupaten Halmahera Selatan*)

Pernyataan Sekretaris BPBD Kabupaten Halmahera Selatan tersebut di atas, dibenarkan oleh

Bapak Sefnat Ido selaku masyarakat Desa Kuwo mengatakan :

“responsivitas pegawai BPBD Kabupaten Halmahera Selatan dalam pelayanan logistik sangat cepat, itu jikalau apabila semua logistik sudah tersedia, jika belum tersedia, biasanya pegawai BPBD berusaha untuk menyediakan logistik yang dibutuhkan oleh masyarakat” (*wawancara tanggal 14 September 2021*)

Ungkapan yang sama pula disampaikan Bapak Budiyo selaku masyarakat Desa Pasupalele mengatakan :

“kalau bilang tanggap (responsivitas) atas pelayanan logistik pasca bencana oleh pihak BPBD Kabupaten Halmahera Selatan, saya selaku masyarakat mengatakan memang sangat tanggap atas persoalan-persoalan logistik yang masyarakat Pasupalele butuhkan.

...pasca bencana itu, penyaluran logistik banyak dilakukan pegawai/staf BPBD. Walaupun Desa Pasupalele ini agak jauh dari Ibukota Labuha, tapi responsivitas yang dilakukan pegawai BPBD sangat bagus dan juga cepat untuk menyalurkan berbagai logistik yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu” (*wawancara tanggal 11 November 2021*)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa responsivitas pegawai BPBD Kabupaten Halmahera Selatan sudah sangat baik dalam memberikan pelayanan logistik pasca bencana terhadap masyarakat. Jadi, responsivitas ini yang menyangkut ukuran kemampuan organisasi untuk memenuhi dan mengetahui dengan baik akan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, yang kemudian menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Akuntabilitas Kinerja Pegawai

Menurut Agus Dwiyanto (2006), Akuntabilitas, adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholders dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Jadi, akuntabilitas merupakan bagian dari perwujudan hasil kinerja instansi pemerintah yang dicapai dalam pelaksanaan program-program dan atau pelaksanaan kegiatan, yang kemudian hasil kinerja tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam instansi pemerintahan baik pada level pemerintahan pusat maupun level pemerintahan daerah. BPBD Kabupaten Halmahera Selatan yang memiliki tugas pokok yakni membantu pemerintah daerah/Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Penanggulangan Bencana Daerah. Melalui tugas pokok tersebut, maka seluruh rangkaian program-program dan kegiatan BPBD yang direncanakan dan kemudian dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan guna untuk mencapai hasil kinerja yang lebih baik.

Dalam pelayanan logistik pasca bencana di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaporkan hasil kinerja pegawai dan instansinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kepala (Perkap) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan bencana menjelaska bahwa “Seluruh proses manajemen logistik dan peralatan yang telah dilaksanakan harus dibuat pertanggung jawabannya”, Pertanggungjawaban penanggulangan bencana baik keuangan maupun kinerja, dilakukan pada setiap tahapan proses dan secara paripurna untuk seluruh proses, dalam bentuk laporan oleh setiap pemangku proses secara berjenjang dan berkala sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Terkait dengan akuntabilitas kinerja pegawai BPBD Kabupaten Halmahera Selatan dalam pelayanan logistik pasca bencana, berikut kutipan wawancara Bapak M. Ichwan Isk Alam, SE selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Halmahera Selatan mengatakan bahwa :

“akuntabilitas kinerja pegawai dan instansi BPBD untuk tahun 2019 sudah mencapai target yang

ditentukan. Capaian kinerja pegawai sudah sangat baik.

.....hal ini tidak lepas dari bantuan teman dari instansi lain dan lembaga, juga teman LSM dan relawan, serta TNI dan Polri yang selalu aktif dalam membantu pegawai BPBD dalam pelayanan logistik di wilayah terdampak bencana tahun 2019” (*wawancara tanggal 13 September 2021 di Kantor BPBD Kabupaten Halmahera Selatan*)

Pernyataan yang sama pula disampaikan Bapak Sukari Sudjana, SE selaku Kepala Seksi Logistik mengatakan bahwa :

“akuntabilitas kinerja pegawai dalam pelayanan logistik pasca bencana memang sudah baik. Pegawai bekerja juga penuh dengan semangat dan selalu bekerja sesuai dengan target yang diharapkan” (*wawancara tanggal 13 September 2021 di Kantor BPBD Kabupaten Halmahera Selatan*)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas kinerja pegawai dalam pelayanan logistik pasca bencana telah mencapai hasil yang baik. Capaian kinerja pegawai tidak lepas dari kerja sama semua elemen (LSM, TNI, Polri) yang bergerak bersama-sama untuk membantu dalam memberikan pelayanan logistik ke daerah/ desa yang terdampak bencana. Prinsipnya bahwa akuntabilitas kinerja bagian dari pertanggung jawaban hasil kerja dan capaian yang dilaksanakan. Maksud dan tujuan pertanggung jawaban kinerja semata-mata adalah :

- a) Mempertanggung jawabkan seluruh pelayanan logistik dan peralatan kepada para pemangku kepentingan;
- b) Mempertanggung jawabkan kepada masyarakat; dan
- c) Memudahkan pelacakan apabila terjadi kesalahan.

4 Kesimpulan

Adapun berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

Kinerja pegawai BPBD Kabupaten Halmahera Selatan dilihat dari aspek produktivitas pelayanan logistik pasca bencana sesungguhnya belum maksimal dilaksanakan, ini disebabkan karena sarana dan prasarana pendukung kinerja pegawai yang belum memadai, sedangkan dari sisi kompetensi SDM pegawai sudah sangat mendukung.

Kinerja pegawai BPBD Kabupaten Halmahera Selatan dari aspek kualitas pelayanan logistik sesungguhnya belum maksimal dilaksanakan, yakni ketepatan waktu pelayanan logistik dikarenakan rentan kendali ke lokasi/ tempat desa yang terdampak bencana sulit dijangkau sehingga pelayanan logistik kadangkala tidak tepat waktu saat pelaksanaan distribusi ke desa-desa. Sikap pegawai BPBD sudah sangat baik, sikapnya sopan santun dan sikap ramah yang dimiliki pegawai pada saat pelayanan logistik bencana.

Responsivitas pegawai BPBD sudah sangat baik dalam pelayanan logistik pasca bencana terhadap masyarakat yang terdampak bencana, pegawai selalu tanggap terhadap persoalan logistik dan tidak pilih kasih dalam memberikan pelayanan logistik. Akuntabilitas kinerja pegawai BPBD juga sudah baik, capaian kinerja sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian kinerja pegawai selama pelaksanaan pelayanan logistik pasca bencana di lokasi/tempat desa yang terdampak bencana tidak lepas dari adanya kerja sama semua elemen baik itu LSM, TNI, Polri dan instansi lainnya.

Referensi

- Arikunto dan Suharsimi. (1999). *Manajemen Penelitian*, Cetakan Keempat, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Abe Alexander. (2001). *Perencanaan Daerah, Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Penerbit Lapera Pustaka Utama, Jakarta

- Bowersox, D. J. (2002). *Manajemen Logistik: Integrasi Sistem-Sistem Manajemen Distribusi Fisik dan Manajemen Material*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dessler Gary. (1992). *Manajemen Personalia, Teknik dan Konsep Modern*, Diterjemahkan oleh : Agus Dharma, Erlangga, Edisi Ketiga, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus, dkk. (2006). *Reformasi Birokrasi*. (Jakarta: Gramedia Offcet)
- Ekram, I., Tuanaya, W., & Wance, M. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik Kantor Manunggal Satu Atap Provinsi Maluku. *Journal of Governance and Social Policy*, 3(1), 1-13.
- Haerudin Ihsan. (2003). "Anggaran Pro Rakyat Miskin", Bujet, Edisi 9/Oktober.
- Handoko T. Hani, 1999. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua, BPFE Yogyakarta.
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24-34.
- Hellingrath, B., dan Widera, A. (2011). *Survey on Major Challenges in Humanitarian Logistics*. Proceedings of the 8th International ISCRAM Conference,
- Gustavsson, L. (2003). Humanitarian Logistics: Context and challeges. *Forced Migration Review*.
- James, Gibson L. John M, Ivancevich dan James H. Donnelly, Jr. (1996). *Organisasi : Perilaku, Strukturu, Proses*, Binarupa Aksara, Jilid I, Diterjemahkan oleh : Nunuk Adiarni, Edisi Kedelapan, Jakarta.
- Maarif Syamsul. (2003). "Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Guna Mengantisipasi Kebutuhan Sektor Pelayanan Publik", (Orasi Ilmiah Wisuda XXII/ 2003 STIA LAN), Bandung.
- Mardiasmo. (2001). *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Makalah Seminar Otonomi Daerah, oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)*, Batam.
- Murdijanto P. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen*. Penerbit Grafindo Persada, Cetakan Kelima, Jakarta.
- Moenir, 2002, *Manajemen Pelayanan Umum*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Mangkunegara Prabu Anwar. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Priyanto Agus, 2003, "Mendorong Partisipasi Publik untuk Transparansi APBD", (Bujet, Edisi 10/Nopember - Desember).
- Rivai. (2005). " *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia* ", Yogyakarta
- Ruky S. Achmad. (2001). ; *Sistem Manajemen Kinerja*. PT Gramedia, Jakarta.
- Soedarmayanti. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi daerah*. PT. Mandar Maju. Bandung.
- Suyadi, Prawirosentono. (1999). *Kebijakan Kinerja Karyawan*. BPFE, Yogyakarta.
- Selanno, H., & Wance, M. (2021). Performance Of Inspectorate In Supervision Of Government Administration In Buru Selatan Regency. *Sosiohumaniora*, 23(2), 189-157.
- Sutopo, (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Siswanto Sastrohadiwiryo. (2003). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sinambela P. (2010). *Menejemen Sumber Daya Manusia*, Bayumedia publishing, Jakarta
- Thomas, A., Kopczak L. (2005). *From Logistics to Supply Chain Management. The Path Forward in the Humanitarian Sector*. San Francisco: Fritz Institute.
- Usman Husaini. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial*. Penerbit Bumi Aksara, Bandung.
- Widodo, Joko, (2001), *Good Governance, Telaah Dari Dimensi; Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*, Surabaya, Insan Cendikia
- Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- La Suhu, B., Ibrahim, A. H. H., Kaunar, A., & Umar, B. (2022). FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2019 DI DESA DAMA

KECAMATAN LOLODA KEPULAUAN. *JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO-JGOA*, 3(2), 18-23.

Komisi Hukum Nasional. (2003). Penjelasan Atas Keputusan MENPAN No. 63/Kep./M.PAN/7.

Perka BNPB No.13/2008 Tentang Pedoman Manajemen Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana.

Paryanto, P., Wance, M., Hadi, A., & La Suhu, B. (2022). Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 4(2), 150-164.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1999, "Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah".

Tim Studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SPSAKIP), 2006, "Manajemen Pemerintahan Baru", Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Jakarta.

Wance, M., Rifdan, R., Takdir, M., & Ferdian, A. (2023). Remote Indigenous Community Empowerment Policy in Realizing Public Service in Darlale Village, Buru Regency. *Journal of Governance*, 8(1).